

PENTINGNYA PERAN RIMBAWAN DALAM MENGELOLA HUTAN PRODUKSI LESTARI

Oleh :
Ridwan Yahya dan Eliyin

*Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK)
Banda Aceh*

Pendahuluan

Sejak tahun 1950-an, masalah lingkungan mendapat perhatian bukan saja dari para ilmuwan tetapi juga dari masyarakat umum dan politisi negara maju. Namun yang paling menggema adalah diadakannya Konferensi Stockholm pada bulan Juni 1972 yang menghasilkan penting, diantaranya telah disepakati bahwa masalah lingkungan yang terjadi pada suatu negara bukan hanya merupakan masalah negara tersebut, tetapi merupakan masalah bersama dan oleh sebab itu diupayakan penanggulangannya secara bersama-sama.

Dari Konferensi Stockholm tersebut, tersebar issue tentang akan terjadinya pemanasan global (*Global Warming*) karena dari beberapa penelitian menunjukkan telah terjadi lubang-lubang pada lapisan pelindung bumi (ozon) dan semakin meningkatnya konsentrasi CO₂ di udara, sehingga dikhawatirkan akan mencairkan es di kutub dan menurunkan keanekaragaman jenis flora dan fauna di bumi.

Kekhawatiran masyarakat dunia, terutama negara-negara maju, telah mempengaruhi politisi dan LSM-LSM bukan saja di negara maju, tetapi juga pada negara-negara yang sedang berkembang, dalam melontarkan tuduhan terutama kepada negara-negara yang memiliki hutan tropis.

Sebenarnya tuduhan ini tidak beralasan sebab kerusakan lingkungan global oleh eksploitasi hutan lebih kecil kalau dibandingkan dengan pencemaran yang disebabkan oleh industri-industri negara maju. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan alam tropis, ITTO mencanangkan tahun 2000 sebagai awal diterapkannya ekolabel pada produk yang berasal dari hutan tropis.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ITTO yang memiliki 10% hutan tropis dunia dan penghasil plywood terbesar di dunia telah menindaklanjuti keputusan ITTO tersebut dengan mengeluarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 252/Kpts-II/1993 dan SK Perubahan Nomor 576/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan produksi Alam Indonesia Secara Lestari serta mengeluarkan SK Nomor 610/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan

Indikator Pengelolaan Hutan Alam Secara Lestari pada Tingkat Manajemen Unit.

Namun harus disadari bahwa pengelolaan hutan Indonesia masih harus disempurnakan untuk memenuhi kriteria hutan dengan pengelolaan lestari. Terbukti dengan kenyataan di lapangan terutama pada tingkat pengelolaan manajemen unit, antara lain masih banyaknya kawasan hutan yang belum ditata batas dan dikukuhkan, masih belum efektifnya kegiatan perlindungan hutan, masih kurang dilibatkannya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dan belum dilaksanakan petunjuk teknis secara benar dan sungguh-sungguh.

Salah satu penyebab yang cukup mendasar terletak pada sumberdaya manusianya, khususnya sumberdaya tenaga teknis kehutanan (Rimbawan). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah tenaga teknis yang dikerjakan pada HPH belum seimbang dengan luas hutan yang dikelola.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas profesionalisme rimbawan serta mengikutkan mereka dalam pengambilan keputusan, terutama pada tingkat manajemen unit (HPH).

Tinjauan tentang Eksistensi Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan Indonesia

Keberhasilan pembangunan kehutanan di Indonesia tidak terlepas dari peran rimbawan, baik yang berada di pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah besarnya devisa negara yang didapat dari sektor kehutanan dan menjadi primadona terbesar setelah minyak bumi dan gas.

Namun di tengah keberhasilan sektor kehutanan dalam pembangunan nasional pada akhir-akhir ini timbul isu bahwa pemanfaatan sumberdaya hutan di negara-negara tropis (termasuk Indonesia), dilakukan dengan kurang bijaksana. Konsekuensi dari pernyataan ini menyebabkan Indonesia sebagai negara yang memiliki 10% luas hutan tropis dunia dan sebagai pengeksport *plywood* terbesar di dunia serta sebagai negara *Mega Biodiversity* nomor tiga di dunia, akhirnya harus meninjau kembali pelaksanaan pengelolaan hutannya.

Sebenarnya pengelolaan hutan di Indonesia telah lama diarahkan pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dengan keluarnya kebijakan-kebijakan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun dalam kenyataannya petunjuk-petunjuk tersebut belum dilaksanakan secara benar dan konsekuen, terutama pada tingkat manajemen unit HPH.

Penyebab yang sangat mendasar sulitnya penerapan pengelolaan hutan secara lestari diantaranya disebabkan oleh :

1. Belum banyak rimbawan yang handal di Indonesia yang memiliki sosok :
 - a. Profesional, ahli dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

- b. Kepekaan dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan global dan perubahan lingkungan.
 - c. Kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial.
 - d. Jiwa wiraswasta yang tinggi bagi mereka yang bekerja di BUMN dan perusahaan swasta (Suryohadikusumo, 1994).
2. Masih kurangnya jumlah rimbawan dibandingkan dengan luas sumberdaya hutan yang harus dikelola. Salah satu contoh dapat dilihat dari data yang dihimpun terhadap 13 HPH di Daerah Istimewa Aceh yang memiliki total luas konsesi perusahaan hutan 1.209.500 ha, hanya melibatkan sekitar 35 Sarjana Kehutanan, 8 Sarjana Muda Kehutanan dan 10 lulusan SKMA/KKMA.
 3. Rimbawan masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kecilnya wewenang mereka pada tingkat manajemen unit. Hal ini terbukti dengan hampir tidak adanya rimbawan yang menduduki posisi manajer camp dan manajer/kepala produksi, apalagi pada posisi kunci, yaitu direktur dan komisaris. Umumnya mereka ditempatkan pada staf perencanaan dan pembinaan hutan.

Pentingnya Eksistensi Tenaga Teknis Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Secara Lestari

Dalam konsep pengelolaan hutan secara lestari penekanan terhadap eksistensi rimbawan baik jumlah, profesionalisme dan andilnya belum mendapat perhatian seperti yang diharapkan. Kebijakan menuju pengelolaan hutan secara lestari yang telah ditetapkan baik dalam SK Menteri Kehutanan No. 252/Kpts-II/1993 dan SK Perubahan No. 576/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari serta SK No. 610/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Secara Lestari pada Tingkat Manajemen Unit, belum menjadikan sumberdaya manusia kehutanan sebagai salah satu aspek yang cukup mendasar dalam rangka menuju pengelolaan hutan secara lestari. Pada kriteria yang telah disusun, tenaga teknis kehutanan hanya merupakan bagian dari aspek sosial ekonomi.

Berdasarkan GBHN 1993 dan berbagai pertimbangan seperti yang telah dikemukakan di atas maka diusulkan agar dalam kriteria pengelolaan hutan secara lestari, persoalan sumberdaya manusia kehutanan diberi perhatian besar dan dijadikan satu aspek tersendiri. Kriteria hendaknya menurut enam aspek, yaitu aspek sumberdaya hutan, kelestarian hasil, konservasi, sosial ekonomi, institusi dan aspek sumberdaya manusia kehutanan. Sedangkan indikatornya meliputi penyerapan tenaga kehutanan, kualitas tenaga teknis kehutanan dan posisi/jabatan tenaga kehutanan.

Diharapkan dengan adanya kriteria dan indikator seperti itu, maka pihak pemegang HPH akan lebih memperhatikan eksistensi tenaga teknis kehutanan, baik dalam penyerapan tenaga kerja, pemberian posisi penting dan wewenang sepenuhnya dalam pengelolaan hutan sejauh tidak bertentangan dengan ekonomi perusahaan. Di samping itu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu ditinjau kembali kebijakan tentang standar jumlah tenaga teknis kehutanan berdasarkan luas yang telah ditetapkan, sebab kebijakan tersebut belum mendukung upaya menempatkan para rimbawan pada posisi yang vital dalam pengelolaan hutan.

Penekanan ini sangat penting karena selama ini hambatan yang paling mendasar untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari disebabkan kepada rimbawan yang berada di HPH kurang diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menetapkan besarnya produksi, karena dicurigai dapat merugikan perusahaan.

Di lain pihak, rimbawan yang telah berkecimpung pada tingkat manajemen unit HPH tetap mempertahankan profesionalismenya. Hasil Mukhtar PERSAKI pada bulan Juni 1987 yang dikutip oleh Effendy (1990) merekomendasikan agar profesionalisme yang merupakan *resultante* kemampuan teknis, dedikasi dan etika Kode etik PERSAKI ditaati oleh para rimbawan.

Kesimpulan

1. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*), harus dimulai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama sumberdaya manusia kehutanan, kualitas dan kuantitasnya.
2. Dalam kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari perlu ditekankan pentingnya eksistensi sumberdaya manusia, terutama sumberdaya manusia kehutanan.
3. Sesuai dengan GBHN dan upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari disarankan agar sumberdaya manusia kehutanan dalam kriteria dan indikator pengelolaan dijadikan aspek tersendiri, bukan merupakan bagian dari aspek sosial ekonomi.
4. Departemen Kehutanan perlu mengeluarkan kebijaksanaan tentang penambahan jumlah tenaga teknis kehutanan dalam standar tenaga teknis kehutanan.

Daftar Pustaka

- Anonymous. 1989. Pendisiplinan dan Profesionalisme Tenaga Kerja dalam HPH. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____. 1990. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari. Departemen Kehutanan, Jakarta.

- _____. 1993. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari pada Tingkat Manajemen Unit. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____. 1993. Pedoman ITTO untuk Pengelolaan Hutan Alam Tropis Secara Lestari. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- _____. 1993. Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 252/Kpts-II/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari. Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Coto, Z. 1993. Kriteria, Indikator dan Aplikasi Pengelolaan Hutan Lestari. Majalah Kehutanan, Jakarta.
- Effendy, A. 1990. Meningkatkan Profesionalisme Rimbawan Indonesia. Makalah Kongres Kehutanan Indonesia II, Jakarta.
- Soemarwoto, O. 1992. Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suryohadikusumo, D. 1994. Kebijakan Departemen Kehutanan dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Rimbawan, Jakarta.